

ANALISIS KAREKTERISTIK USAHA TERHADAP AKSESIBILITAS PEMBIAYAAN PERBANKAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA TIMUR

Dhonna Widya Poernamasari

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia

ABSTRACT

Contribution of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in development has been recognized by the whole world, due to the nature of SMEs that are resistant to the effects of the economic crisis and may stimulate an increase in employment and national income of a country. Similarly, in East Java province, where in 2012 SMEs is able to provide a contribution about 53.95% to the GDP of East Java. Obstacle often faced by SMEs is the problem of financing. It can be seen from the small percentage of SMEs that have been mediated by the existing financial institutions. The lack of access to financial institutions is caused by the element of information asymmetries between SME entrepreneurs and also the creditors, both banking and non-banking. This study tried to see how the characteristics of SMEs related to the accessibility of banking in East Java province. These characteristics include the business sector, the scale of business, age of business, the market share the products and business ownership. The data used is the Census data of Micro, Small and Medium Enterprises in East Java province in 2012, whereas the statistical methods used Logistic Regression to see the relationship between the dichotomous dependent variables with several independent variables.

Keywords: *SDE, Financial Access, East Java, Business Characteristic*

PENDAHULUAN

Dengan adanya kesepakatan ASEAN *Economic Community* (AEC) yang mulai dilaksanakan tahun 2015 ini, Indonesia sebagai bagian dari negara ASEAN harus lebih tanggap untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, *hard skill* dan *soft skill* agar mampu berkompetisi dan menjadi pelaku inti dalam perekonomian baik di pasar lokal, nasional, regional dan internasional. Liberalisasi ekonomi tidak dapat dihindari yang ditandai dengan adanya kompetisi antar pelaku ekonomi yang semakin besar. Tantangan liberalisasi ekonomi tidak hanya dihadapi oleh industri dan usaha skala besar, namun juga sangat berdampak pada keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM memiliki kontribusi secara sosial dan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan inovasi, sehingga mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan wilayah pedesaan maupun perkotaan (Fatoki dan Asah, 2011). Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di negara maju merupakan akselerator tenaga kerja, inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Mura, 2012). Sedangkan di negara-negara berkembang, sektor UMKM telah mengkaryakan lebih dari 22% dari total tenaga kerja produktif (Kayanula, et al., 2000). Di Indonesia, jumlah UMKM di tahun 2013 mencapai 57.895.721 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 114.144.082 orang atau 96,99% dari total tenaga kerja, sedangkan kontribusi UMKM terhadap PDB adalah sebesar 60,34% (www.depkop.go.id).

Tabel 1.1.
Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2008-2012

Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah UMKM	Unit	52.764.750	54.114.821	55.206.444	56.534.592	57.895.721
Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	96.193.623	98.238.913	101.722.458	107.657.509	114.144.082
Kontribusi UKM terhadap PDB (harga konstan)	Rp (Miliar)	1.212.599	1.282.572	1.369.326	1.451.460	1.536.919
Nilai Ekspor UMKM	Rp (Miliar)	178.008	175.895	187.442	166.627	182.113

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM RI (www.depkop.go.id)

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2013, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu sebesar 38.999.837 jiwa (www.dukcapil.kemendagri.go.id). Populasi penduduk yang besar merupakan sebuah potensi bagi Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan perekonomian daerah. Hal tersebut terbukti dengan jumlah PDRB Provinsi Jawa Timur menempati posisi nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. PDRB Provinsi Jawa Timur sebagian besar ditopang oleh sektor riil, sementara PDRB Provinsi DKI Jakarta lebih dominan ditopang oleh sektor perbankan (BPS Jawa Timur, 2015).

Tabel.1.2
Provinsi dengan PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Terbesar di Indonesia Tahun 2009-2012

(dalam Milyar Rupiah)

PROVINSI	2009	2010	2011	2012
DKI Jakarta	371.469	395.622	422.237	449.821
Jawa Timur	320.861	342.281	366.983	393.666
Jawa Barat	303.405	322.224	343.111	364.405
Jawa Tengah	176.673	186.993	198.270	210.848
Sumatera Utara	111.559	118.719	126.588	134.464

Sumber : www.bps.go.id (data diolah)

Perekonomian Jawa Timur juga mampu tumbuh sebesar 5,86 persen di tahun 2014, nomor

2 terbesar di antara 5 provinsi lainnya di pulau Jawa, meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2013. Perlambatan ekonomi di sebagian besar provinsi di pulau Jawa diduga akibat kinerja ekonomi makro yang kurang baik di tahun 2014, terutama berkaitan dengan kecenderungan melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS (BPS Jawa Timur, 2015)

Tabel.1.3.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa (%)

Tahun 2013-2014

PROVINSI	2014	2013
DKI Jakarta	5,95	6,11
Jawa Timur	5,86	6,08
Banten	5,47	7,13
Jawa Tengah	5,42	5,14
D.I. Yogyakarta	5,18	5,49
Jawa Barat	5,07	6,33

Sumber: BPS Jawa Timur, 2015

Secara nyata, sektor UMKM di Jawa Timur mampu memberikan kontribusi sebesar 53,95% kepada PDRB Jawa Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa UMKM dapat berperan sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan *multiplier effect* produksi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu berupaya untuk terus memprioritaskan pembangunan di sektor UMKM agar mampu meningkatkan PDRB yang bermuara pada peningkatan PDRB per kapita masyarakat Jawa Timur.

Tabel. 1.4.

Kontribusi UMKM Jawa Timur terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rp)	Pertumbuhan PDRB ADHB UMKM (%)	PDRB UMKM JATIM		PROPORSI PDRB UMKM ADHB (%)
				ADHB (Milyar Rp)	ADHK (Milyar Rp)	
1	Pertanian Pertambangan	141.260,34	4,21	121.097,62	48.691,49	85,73
2	&Penggalian Industri	19.899,30	1,75	10.985,16	5.012,67	55,20
3	Pengolahan Listrik, Gas, Air,	240.353,16	4,28	70.223,57	26.486,96	29,22
4	Bersih	12.743,04	5,18	56,62	34,70	0,44
5	Konstruksi Perdagangan,	41.628,77	11,00	17.966,15	5.420,76	43,16

6	Hotel, Restoran Angkutan, Komunikasi,	266.882,82	11,17	183.067,33	78.260,93	68,59
7	Keuangan, Jasa	50.206,34	7,71	17.791,62	8.014,16	35,44
8	Perusahaan	43.400,71	7,58	16.509,10	7.405,20	38,04
9	Jasa	75.004,74	5,38	43.170,57	17.867,11	57,56
	Jumlah	891.379,22	7,42	480.867,75	197.193,99	53,95

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2012)

Berdasarkan hasil Sensus UMKM Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012, total jumlah UMKM di Jawa Timur adalah sebanyak 6.825.931 UMKM. Dari total tersebut, 6.533.694 diantaranya merupakan usaha skala mikro yang didominasi oleh usaha informal yang memiliki aset, akses dan produktivitas terbatas. Sedangkan sisanya, 261.827 unit merupakan usaha skala kecil dan 30.410 unit merupakan usaha skala menengah. Sektor pertanian memiliki unit usaha terbanyak dengan jumlah 4.112.443 unit, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 1.720.039 unit dan sektor jasa dengan jumlah usaha sebanyak 411.342 unit yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

UMKM memiliki banyak permasalahan klasik yang seringkali menjadi faktor penghambat perkembangannya, antara lain minimnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya penguasaan teknologi, kurangnya informasi mengenai akses permodalan, pemasaran dan peningkatan kapabilitas. Faktor permodalan adalah bagian terpenting dalam operasional aktivitas bisnis, karena tanpa kemudahan akses permodalan justru akan mengakibatkan kerentanan terhadap keberlangsungan dan penumbuhan potensi usaha (Rahaman, 2011). Rahaman juga menyatakan bahwa usaha skala kecil dan menengah tidak pernah mudah memperoleh bantuan modal dan jasa perbankan lainnya dengan tingkat bunga dan persyaratan yang terjangkau. Aksesibilitas keuangan baik dari sumber formal maupun informal akan mengurangi permasalahan hambatan kredit yang akan digunakan untuk investasi awal maupun pengembangan usaha (Beck, et.al., 2015).

Di balik jumlahnya yang besar, sebagian besar UMKM di Jawa Timur masih menghadapi kendala dalam aksesibilitas pembiayaan usaha. Berdasarkan Sensus UMKM Jawa Timur tahun 2012, sebanyak 89% dari jumlah UMKM di Jawa Timur belum mendapat bantuan pembiayaan usaha, baik dari koperasi, perbankan maupun bantuan kemitraan. UMKM yang telah mengakses perbankan sebesar 5%, koperasi 4% dan program kemitraan sebanyak 3%. Hal tersebut sangatlah ironis, mengingat UMKM telah terbukti mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain perkembangannya terhambat karena minimnya informasi penetrasi pembiayaan usaha bagi UMKM.

Untuk mengatasi minimnya akses UMKM ke sumber daya produktif tersebut, Pemerintah UMKM Jawa Timur telah melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pembiayaan usaha, antara lain dengan mendirikan Bank UMKM Jawa Timur, Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (PT. Jamkrida) dan PT. Sarana Jatim Ventura. Adanya ketiga lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses pengusaha UMKM ke sumber permodalan.

Untuk itu, dalam penelitian kali ini, penulis ingin melihat bagaimana karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengakses lembaga perbankan di Jawa Timur. Karakteristik yang diteliti mencakup Sektor Usaha, Skala Usaha, Umur Usaha, Market Share Produk dan Kepemilikan Usaha.

KAJIAN LITERATUR

Teori tentang struktur permodalan pertama kali dikemukakan melalui MM Theory yang

menyatakan bahwa nilai dari sebuah perusahaan tidak berkaitan dengan keputusan permodalan (*financing*) jika perusahaan tersebut berda dalam pasar persaingan sempurna (Modigliani dan Miller, 1958). Keuntungan dalam struktur modal perusahaan yang diperoleh dari penggunaan hutang antara lain karena timbulnya bunga hutang yang dapat digunakan sebagai komponen pengurang pajak sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan tambahan berupa *tax saving* (Modigliani dan Miller, 1963). Oleh karena itu, MM Theory juga menyatakan bahwa perusahaan seharusnya menjadikan struktur permodalannya bersumber dari 100% hutang sehingga dapat menikmati *tax shield benefit*. *Tax saving* membuat biaya hutang menjadi lebih murah dibandingkan biaya yang timbul akibat perusahaan mengeluarkan sejumlah saham untuk mendanai struktur permodalannya.

Konflik antara pemegang modal, manager dan kreditur dikenal sebagai *Agency Theory* yang diperkenalkan oleh Jensen dan Mecling (1976). Teori ini mengungkapkan bahwa konflik antara pemegang modal dan manager perusahaan akan meningkat apabila manager tidak dapat memaksimalkan tujuan perusahaan, oleh karena itu para pemegang modal akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memantau dan mempengaruhi keputusan manager dengan harapan akan dapat meningkatkan kemakmuran perusahaan. Konflik ini tidak akan muncul jika seluruh *stakeholders* memiliki informasi yang sama, namun dalam kenyataannya kondisi tersebut tidak mudah untuk diselesaikan.

Stiglitz dan Weiss (1981) menyatakan bahwa adanya *agency problems* seperti asimetri informasi dan *moral hazards* dapat mempengaruhi akses ke sumber finansial yang pada akhirnya berpengaruh pada struktur kapital perusahaan. Karena adanya *agency problems* tersebut, maka muncul *The Pecking Order Theory* yang menekankan bahwa perusahaan akan terlebih dahulu mengoptimalkan sumber pendanaan internal untuk investasi, sebelum memutuskan untuk menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari hutang dan ekuitas (Myers, 1984). Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan investasi melalui pasar modal akan lebih besar dibandingkan jika perusahaan memutuskan untuk hutang sebagai salah satu opsi pendanaan. UMKM akan memilih menggunakan hutang karena kurangnya dana internal yang dimiliki dan ketidakmampuan untuk mengakses modal melalui pasar saham (Freelinghaus et al., 2005).

Adanya korelasi antara sektor usaha dengan hutang yang digunakan telah dibuktikan melalui beberapa studi empiris. Diantaranya oleh Hall et al. (2000) yang membuktikan bahwa meskipun beberapa perusahaan memiliki sensitivitas terhadap berbagai macam karakteristik industri, namun variabel strategi keuangan merupakan faktor terpenting yang menentukan operasional perusahaan. Selain itu, UMKM yang bergerak di industri sektor pertanian memiliki struktur kapital dan asset terkuat diantara sektor industri lainnya. Secara empiris, hal tersebut dibuktikan oleh Abor (2007) dan dinyatakan bahwa industri retail dan perdagangan justru memiliki struktur asset yang paling lemah dibandingkan dengan sektor lainnya.

Dalam hal skala usaha, usaha besar cenderung untuk melakukan diversifikasi struktur keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha dan mengurangi risiko kebangkrutan (Honhyan, 2009). Di sisi lain, Fatoki dan Asah (2011) menyatakan bahwa ukuran atau skala usaha mempengaruhi akses permodalan UMKM melalui perbankan komersial, dimana perbankan lebih memilih untuk mendanai usaha besar dibandingkan usaha skala kecil. Usaha kecil juga menghadapi permasalahan biaya yang besar dalam memperoleh bantuan permodalan karena adanya asimetri informasi antara pengusaha dan kreditur (Cassar, 2004).

Akibat adanya kesenjangan dalam masalah informasi (asimetri informasi), perusahaan akan membangun reputasi kredit seiring dengan perkembangan yang menunjukkan kinerja perusahaan. Reputasi kredit yang terbentuk akan menunjukkan seberapa besar *moral hazards* perusahaan dalam pandangan calon kreditur. Semakin lama perusahaan beroperasi, maka usaha tersebut dianggap semakin persisten terhadap guncangan perekonomian (Chandler, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Klapper (2010) membuktikan bahwa usaha yang berusia di bawah 5 tahun cenderung tidak akan menggunakan hutang dalam kegiatan operasionalnya. Begitu pula Berger dan Udell (1998) yang meneliti tentang keputusan struktur kapital dan pembiayaan usaha, mengemukakan bahwa pada setiap titik siklus pertumbuhan usaha, UMKM akan menghadapi optimalisasi struktur pembiayaan yang berbeda-beda.

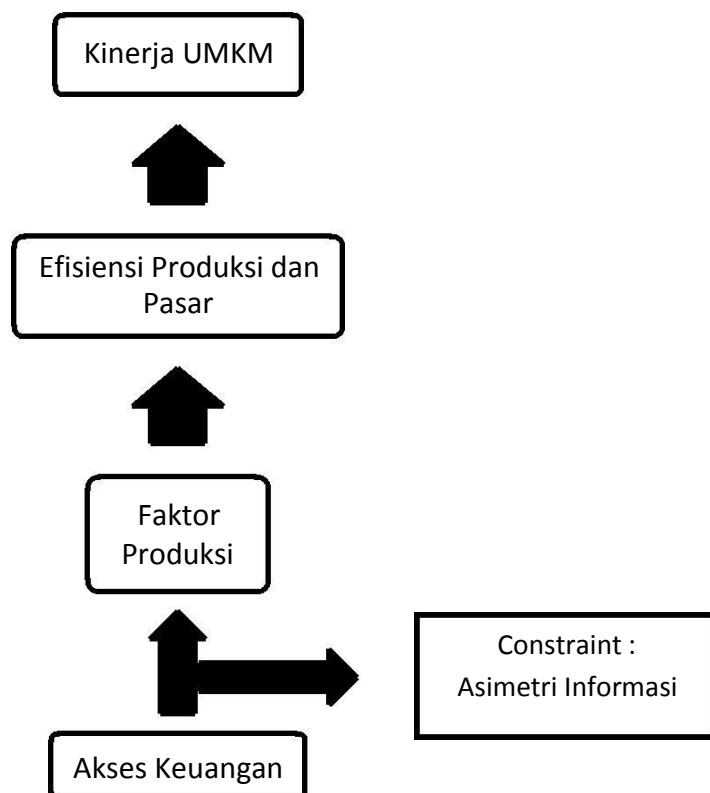
Di dalam kaitannya dengan bentuk badan hukum usaha, Cassar (2004) membuktikan bahwa kreditur menganggap usaha yang telah memiliki badan hukum (*incorporation*) merupakan sebuah indikator yang baik dalam aspek kepercayaan dan komitmen terhadap hukum. Sedangkan Abor (2008) mengungkapkan bahwa bentuk dari organisasi bisnis memiliki pengaruh terhadap keputusan struktur hutang-ekuitas UMKM. Menurutnya, usaha yang telah memiliki badan hukum cenderung akan membiayai kegiatan usahanya dengan mengeluarkan ekuitas (saham) dibandingkan dengan memilih hutang, sebaliknya perusahaan yang belum memiliki badan hukum akan lebih memilih melakukan hutang untuk mengatasi masalah kekurangan modal yang dihadapinya. Menurut Storey (1994), UMKM dengan ambisi untuk berkembang lebih besar memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber pembiayaan eksternal.

Diversifikasi secara internasional berpotensi mengurangi *expected cost of bankruptcy* dan cenderung untuk meningkatkan kapasitas hutang, atau dengan kata lain, perusahaan yang terlibat dalam aktivitas ekspor cenderung untuk melakukan diversifikasi finansial dan mengakomodasi lebih banyak penggunaan hutang (Abor, 2004). Kinerja ekspor sebuah perusahaan dapat menjadi sebuah informasi yang penting bagi perbankan, karena dapat menggambarkan tingkat kompetisi di dalam pasar yang agresif.

KERANGKA KONSEPTUAL

Akses ke sumber permodalan memiliki pengaruh kepada penggunaan faktor produksi (kapital dan tenaga kerja), namun harus menghadapi hambatan berupa asimetri informasi dan biaya akses yang tinggi. Sebagai contoh jika UMKM menghadapi peningkatan upah tenaga kerja, maka pengusaha akan berupaya untuk meningkatkan produktivitas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan upaya efisiensi dan pengembangan pangsa pasar. Untuk itu, sebagian UMKM akan mengupayakan akses ke sumber daya permodalan untuk memperoleh aset baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan produksinya, sehingga dapat mengurangi *unit cost* produksi dan mengoptimalkan profit UMKM.

Bagan 2.1 . Kerangka Konseptual



DATA DAN METODOLOGI

Data yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah data Cross Section yang berasal dari Sensus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan mencakup UMKM di seluruh 38 kabupaten/kota. Dari hasil sensus tersebut, UMKM di Jawa Timur berjumlah 6.825.931 unit.

Tabel 3.1. Distribusi dan Akses Perbankan UMKM Provinsi Jawa Timur

KABUPATEN /KOTA	Akses ke Bank		Akses Selain ke Bank (Koperasi dan Kemitraan)		Tidak Mengakses		N
	n	%	n	%	n	%	
KAB BANGKALAN	634	0.38%	1,633	0.98%	164,501	98.64 %	166,768
KAB BANYUWANGI	17,858	0.38%	21,492	7.24%	257,356	86.74 %	296,706
KAB BLITAR	14,224	0.38%	14,481	5.67%	226,917	88.77 %	255,622
KAB BOJONEGORO	16,808	0.38%	16,057	5.69%	249,102	88.34 %	281,967
KAB BONDOWOSO	6,214	0.38%	6,703	3.89%	159,461	92.51 %	172,378
KAB GRESIK	7,912	0.38%	12,945	7.69%	147,536	87.61 %	168,393
KAB JEMBER	18,371	0.38%	17,764	4.19%	388,016	91.48 %	424,151
KAB JOMBANG	15,037	0.38%	14,279	7.57%	159,298	84.46 %	188,614
KAB KEDIRI	14,354	0.38%	13,658	5.43%	223,481	88.86 %	251,493
KAB LAMONGAN	17,392	0.38%	17,408	6.89%	217,934	86.23 %	252,734
KAB LUMAJANG	7,205	0.38%	7,742	3.94%	181,499	92.39 %	196,446
KAB MADIUN	9,829	0.38%	14,311	9.76%	122,422	83.53 %	146,562
KAB MALANG	14,978	0.38%	30,903	7.46%	368,635	88.93 %	414,516
KAB MOJOKERTO	14,754	0.38%	12,113	7.79%	128,543	82.71 %	155,410
KAB PACITAN	8,710	0.38%	8,440	4.66%	163,965	90.53 %	181,115
KAB PAMEKASAN	962	0.38%	4,433	2.27%	190,159	97.24 %	195,554
KAB PASURUAN	8,602	0.38%	22,682	9.12%	217,518	87.43 %	248,802
KAB	10,113	0.38%	9,539	4.60%	187,909	90.53	207,561

PONOROGO						%	
KAB PROBOLINGGO	12,400	0.38%	7,820	3.32%	215,066	91.41 %	235,286
KAB SAMPANG	637	0.38%	1,381	0.71%	193,197	98.97 %	195,215
KAB TRENGGALEK	3,824	0.38%	9,904	6.90%	129,727	90.43 %	143,455
KAB TULUNGAGUN G	6,671	0.38%	11,924	6.57%	162,814	89.75 %	181,409
KOTA BATU	3,095	0.38%	1,966	8.35%	18,483	78.50 %	23,544
KOTA BLITAR	1,797	0.38%	1,192	5.60%	18,302	85.96 %	21,291
KOTA KEDIRI	1,572	0.38%	1,293	4.41%	26,441	90.22 %	29,306
KOTA MADIUN	1,399	0.38%	2,264	9.99%	18,999	83.84 %	22,662
KOTA MALANG	4,271	0.38%	3,546	4.56%	69,961	89.95 %	77,778
KOTA MOJOKERTO	932	0.38%	800	4.58%	15,748	90.09 %	17,480
KOTA PASURUAN	1,676	0.38%	1,101	4.54%	21,480	88.55 %	24,257
KOTA PROBOLINGGO	1,933	0.38%	1,168	4.47%	23,024	88.13 %	26,125
KOTA SURABAYA	13,317	0.38%	7,844	3.01%	239,601	91.88 %	260,762
KAB MAGETAN	18,381	0.38%	12,255	7.92%	124,164	80.21 %	154,800
KAB NGANJUK	26,116	0.38%	12,406	6.16%	162,941	80.88 %	201,463
KAB NGAWI	27,580	0.38%	15,063	8.13%	142,669	76.99 %	185,312
KAB SIDOARJO	16,579	0.38%	14,508	8.47%	140,177	81.85 %	171,264
KAB SITUBONDO	3,568	0.38%	6,935	4.42%	146,224	93.30 %	156,727
KAB SUMENEP	1,846	0.38%	3,979	1.48%	263,180	97.83 %	269,005
KAB TUBAN	22,042	0.38%	14,071	6.28%	187,885	83.88 %	223,998
TOTAL	373,593	5.47%	378,003	5.54%	6,074,335	88.99%	6,825,931

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (data diolah).

Metode estimasi dalam penelitian ini menggunakan Regresi Logistik. Analisis Regresi Logistik digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik UMKM terhadap aksesibilitas kredit perbankan. Regresi Logistik seringkali digunakan untuk menganalisis hubungan antara *dichotomous dependent variable* atau *independent dichotomous variables* karena sifatnya yang fleksibel jika terdapat pelanggaran asumsi normalitas di dalam sebuah model (Agresti, 2007). Regresi Logistik juga digunakan untuk memprediksi perilaku *dependent variable* yang diskrit, dikotomis dan *continue* dari beberapa *independent variables* (Fabowale et al., 1995). Untuk mendukung analisa statistik, digunakan perangkat Statistical Package for Social Science (SPSS) Application Program.

Adapun model regresi logistik yang digunakan adalah :

$$\text{Lac} = \alpha + \beta_1 \text{Market}_i + \beta_2 \text{Sect}_i + \beta_3 \text{size}_i + \beta_4 \text{Age}_i + \beta_5 \text{Own}_i + \varepsilon_i$$

Adapun penjelasan variabel-variabel tersebut yaitu :

- Lac** : Menunjukkan akses kredit perbankan (1: mengakses perbankan, 0: tidak mengakses)
- Market** : Menunjukkan *share market* produk (0: domestik, 1: ekspor)
- Sect** : Menunjukkan sektor UMKM (0: Sektor primer, 1: Sektor sekunder, 2 : Sektor Tersier)
- Size** : Menunjukkan skala UMKM (0: Mikro, 1 : Kecil, 2 : Menengah)
- Age** : Menunjukkan umur usaha (0: <5 tahun, 1: 5-10 tahun, 2: > 10 tahun)
- Own** : Menunjukkan status kepemilikan usaha (0: perorangan, 1 : berbadan hukum).

Sedangkan untuk mengetahui korelasi antar variabel baik dependen dan independen, digunakan uji Pearson Correlation. Uji tersebut juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas diantara seluruh variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel. 4.1. Korelasi Antar Variabel

	Variabel	1	2	3	4	5	6
1	Lac	1	0.757**	0.031	0.172*	0.172*	0.201**
2	Market	0.757**	1	0.039	0.212**	0.145	0.131
3	Size	0.031	0.039	1	0.091	0.003	-0.091
4	Age	0.172*	0.212**	0.091	1	-0.075	-0.067
5	Sect	0.172*	0.145	0.003	-0.075	1	0.092
6	Own	0.201**	0.131	-0.091	-0.067	0.092	1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Dengan menggunakan uji Pearson Correlation tersebut, terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki korelasi secara positif dengan variabel dependen Lac (*Loan Access*). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa akses terhadap pembiayaan (kredit perbankan) dipengaruhi oleh share market produk, skala usaha, umur usaha, sektor usaha dan formalisasi usaha.

Tabel. 4.2. Hasil Regresi Logistik

Variable	Odd Ratio	Confidence Interval (95%)	P-value
Sect			
Primer	1.43	0.68 - 2.79	0.250
Sekunder	5.82	2.35 - 7.65	0.038
Tersier	2.85	2.05 - 6.32	0.210
Market			
Domestik	1.01	2.05 - 3.26	0.453
Export	7.12	3.52 - 7.08	0.010
Age			
< 5 tahun	1.12	0.35 - 1.42	0.532
5-10 tahun	4.58	2.42 - 6.32	0.032
> 10 tahun	5.26	3.25 - 6.92	0.024
Size			
Mikro	2.68	2.75 - 3.92	0.325
Kecil	5.35	3.11 - 6.58	0.043
Menengah	6.33	2.03 - 7.65	0.012
Own			
Perorangan	1.23	0.43 - 1.59	0.354
Badan Hukum	4.53	2.24 - 7.85	0.043

Berdasarkan hasil regresi tersebut, koefisien sektor usaha positif dan signifikan secara statistik, sehingga hipotesis terdapat hubungan yang positif antara sektor usaha dengan akses pembiayaan perbankan terbukti. *Odd ratio* bagi sektor primer adalah 1.43 dengan nilai p-value 0.250. *Odd ratio* bagi sektor sekunder adalah 5.82 dengan p-value 0.038. Sedangkan di sektor tersier *odd ratio* adalah 2.85 dengan p-value 0.210. Dari nilai *Odd ratio*, dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas sektor sekunder untuk mengakses pembiayaan perbankan jauh lebih besar dibanding sektor primer dan tersier.

Koefisien *market share* positif dan signifikan secara statistik, sehingga hipotesis bahwa terdapat hubungan yang positif antara *market share* produk dengan akses pembiayaan perbankan terbukti. *Odd ratio* untuk domestik lebih kecil dibandingkan *odd ratio* ekspor sehingga dapat disimpulkan bahwa probabilitas UMKM yang memiliki market share di luar negeri untuk mendapatkan pembiayaan perbankan lebih besar dibandingkan UMKM yang hanya memiliki market share di lingkup lokal daerah ataupun nasional. Hal ini disebabkan perbankan memiliki pendapat bahwa usaha yang telah melakukan ekspor pasti memiliki *cash flow* keuangan yang lebih baik dibandingkan usaha yang memiliki *market share* di level lokal atau domestik.

Sedangkan koefisien skala usaha (*Size*) bernilai positif dan signifikan secara statistik. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis terdapat hubungan yang positif antara skala usaha dengan pembiayaan perbankan adalah benar. *Odd ratio* untuk usaha menengah bernilai paling besar diantara *odd ratio* usaha kecil dan usaha mikro, sehingga dapat dinyatakan bahwa usaha skala menengah memiliki peluang yang paling besar untuk mengakses pembiayaan ke perbankan. Usaha skala menengah memiliki kepercayaan yang lebih besar dibandingkan usaha skala mikro dan kecil, karena telah memiliki jumlah aset dan omzet lebih besar yang dapat dijadikan sebagai *collateral* bagi pihak perbankan.

Umur usaha memiliki hubungan yang positif terhadap akses pembiayaan perbankan yang terbukti dari nilai koefisien umur usaha (Age) positif dan signifikan. *Odd ratio* UMKM dengan umur usaha lebih dari 10 tahun bernilai lebih besar dibanding dengan UMKM yang berumur lebih muda, sehingga UMKM dengan umur usaha lebih dari 10 tahun akan lebih mudah mengakses pembiayaan ke perbankan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena semakin lama perusahaan beroperasi, maka usaha yang berjalan akan dianggap lebih persisten terhadap perubahan negatif yang mempengaruhi operasional perusahaan.

Karakteristik yang terahir adalah kepemilikan usaha, dimana koefisien Own bernilai positif dan signifikan. *Odd ratio* UMKM yang memiliki badan hukum sebesar 4,53, sedangkan *odd ratio* UMKM yang masih dalam bentuk usaha perseorangan bernilai lebih rendah. Nilai tersebut membuktikan bahwa UMKM yang memiliki badan hukum memiliki probabilitas lebih besar untuk memperoleh pembiayaan usaha dari perbankan dibandingkan usaha perorangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa karakteristik UMKM memiliki pengaruh terhadap probabilitas memperoleh kredit atau fasilitas pembiayaan dari perbankan. Secara statistik, terdapat sebuah hubungan yang positif dan signifikan atas karakteristik UMKM yang terdiri dari Sektor Usaha, Skala Usaha, Umur Usaha, Market Share Produk dan Kepemilikan Usaha. Berdasarkan hasil tersebut, penulis mengajukan beberapa rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertama, Bank UMKM Jatim harus lebih dapat lebih memperluas akses fasilitasi pembiayaan ke UMKM di semua sektor tanpa terkecuali. Kedua, pemerintah juga dapat membuat regulasi agar UMKM dengan jaringan pemasaran lokal lebih diberikan perhatian dan prioritas untuk berkembang melalui fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan mutu dan kuantitas produksi, sehingga siap bersaing di pasar internasional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, J., 2007. Industry Classification and The Capital Structure of Ghanaian SMEs. *Studies in Economics and Finance*, 24 (3), 207-219.
- Abor, J., 2008. Determinants of the Capital Structure of Ghanaian Firms. *Small Business Economics*. Diunduh dari <https://www.africaportal.org/dspace/articles/determinants-capital-structure-ghanaian-firms>
- Agresti, A., 2007. *Introduction to Categorical Data Analysis*, 2nd edition.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2015. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*.
- Beck, T., Lu, L., Yang, R., 2015. Finance and Growth for Microenterprises : Evidence for Rural China. *World Development*, 67, 38-56.
- Berger, A.N., Udell, G.F., 1998. The Economics of Small Business Finance : The Roles of Private Equity and Debt Markets in The Financial Growth Cycle. *Journal of Banking and Finance*, 22, 613-673
- Cassar, G., 2004. The Financing of Business Start-ups. *Journal of Business Venturing*, 19(2), 261-283.

- Chandler, J.G., 2009. Marketing Tactics of Selected Small Firms in The East London CBD Area. South Africa : University of South Africa.
- Fabowale, L., Orser, B., Riding, A., 1995. Gender, Structural Factors and Credit Terms Between Canadian Small Businesses and Financial Institution. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 19(4), 41-65
- Fatoki, O., Asah, F., 2011. The Impact of Firm and Entrepreneurial Characteristics on Access to Debt Finance by SME in King William's Town, South Africa. *International Journal of Business and Management*, 6(8).
- Frelinghaus, A., Mostert, B., Firer, C., 2005. Capital Structure and The Firm's Life Stage. *South African Journal of Business Management*, 36(4), 9-18.
- Hall, G., Hutchinson, P., Michealas, N., 2000. Industry Effect on The Determinants of Unquoted SMEs Capital Structure. *International Journal of The Economic of Business*, 7(3), 297-312.
- Hongyan, Y., 2009. The Determinants of Capital Structure of The SMEs: An Empirical Study of Chinese Listed Manufacturing Companies. *Journal of Finance and Economics*.
- Jensen, M.C., Meckling W.H., 1976. Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kayanula, D., Quartey, P., 2000. The Policy Environment for Promoting Small and Medium Sized Enterprise in Ghana and Malawi. Institute For Development Policy and Management. University of Manchester.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia . Rekapitulasi Data Kependudukan Per Provinsi. <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/rekapitulasi-data-kependudukan-per-provinsi-edisi-31-desember-2013>. Diunduh tanggal 10 November 2015.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013. www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=118:data-umkm-2013&Itemid=93 . Diunduh tanggal 28 September 2015.
- Klapper, L., Laeven, L., Rajan, R., 2010. Entry Regulation As A Barrier to Entrepreneurship. *Journal of Financial Economics*, 82(3), 591-623.
- Modigliani, F., Miller, M.H., 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance and The Theory of Investment. *American Economic Review*, 48(3), 261-295.
- Modigliani, F., Miller, M.H., 1963. Corporate Income Taxes and The Cost of Capital : A Correction. *American Economic Review*, 53(3), 433-444.
- Mura, L., Buleca, J., 2012. Evaluation of Financing Possibilities of Small and Medium Industrial Enterprises. *Procedia Economics and Finance* 3, 217-222.
- Myers, S.C., 1984. Capital Structure Puzzle. *Journal of Finance*, 39(1), 575-592.
- Rahaman, M.M., 2011. Access to Financing and Firm Growth. *Journal of Banking and*

Finance 35, 709-723.

Stiglitz, J., Weiss, A., 1981. Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review*, 71, 393-410.

Storey, D., 1994. *Understanding the Small Business Sector*. Routledge. London